
***Asset based community development* sebagai penunjang pembangunan pedesaan di Kabupaten Barito Kuala**

Asset based community development as a tools to improve rural development in Barito Kuala Regency

M Y Ridhani¹ dan A A Priyadharna¹

¹Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, Banjarmasin, Indonesia

Corresponding author's email: dhanimyu@umbjm.ac.id

Abstrak. Di era revolusi industri 4.0, arus globalisasi memberikan pengaruh terhadap aspek pembangunan di Indonesia. Kemajuan teknologi dan informasi berdampak pada modernitas dalam kegiatan pembangunan, perubahan pola pikir masyarakat, dan tingginya keinginan bermigrasi ke wilayah perkotaan. Fenomena ini mengancam keberadaan wilayah pedesaan. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya pembangunan pedesaan, tetapi perlu didukung oleh pendekatan secara *bottom up* agar hasil pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tepat sasaran. *Asset based community development* adalah pendekatan pembangunan secara *bottom up* yang diharapkan dapat menjadi penunjang dalam kegiatan pembangunan pedesaan terutama pembangunan pedesaan di Kabupaten Barito Kuala. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dalam mengidentifikasi dan inventarisasi aset-aset pedesaan sebagai penunjang program pembangunan pedesaan yang dijalankan pemerintah. Pengumpulan data dilakukan melalui metode pengumpulan primer dan sekunder. Hasil penelitian berupa inventaris aset sosial, aset institusi, dan aset fisik pada Desa Pulau Sewangi dan Desa Pulau Alalak. Hasil inventarisasi aset sosial, aset institusi, dan aset fisik menunjukkan terdapat perbedaan dari segi ketersediaan dan kuantitas masing-masing aset di Desa Pulau Sewangi dan Desa Pulau Alalak. Hal ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam perumusan program, kebijakan, dan kegiatan yang diinisiasi oleh pemerintah, swasta, dan perguruan tinggi untuk menunjang pembangunan pedesaan dengan pendekatan *asset based community development* khususnya bagi desa dengan kategori tertinggal.

Kata Kunci: *Asset Based Community Development; Pembangunan Pedesaan*

Abstract. Globalization has had an impact on aspects of development in Indonesia during the Industrial Revolution 4.0. Modernity in development activities, changes in people's mindsets, and a strong desire to migrate to urban areas have all been influenced by advances in technology and information. This phenomenon jeopardizes the survival of rural areas. The government has made various rural development efforts, but they must be supported by a bottom-up approach to ensure that development outcomes are in line with community needs and on target. Asset-based Community Development is a bottom-up development approach that is expected to aid rural development activities, particularly in the Barito Kuala District. The study employed a qualitative approach to identify and inventory rural assets as a supplement to government-run rural development programs. Data was gathered using both primary and secondary sources. The study's findings include an inventory of social assets, institutional assets, and physical assets in Pulau Sewangi and Pulau Alalak villages. An inventory of social assets, institutional assets, and physical assets reveals differences in the availability and quantity of each asset in Pulau Sewangi Village and Pulau Alalak Village. This is expected to be incorporated into the development of programs, policies, and activities launched by the government, private sector, and universities to support rural development through the Asset-Based Community Development approach, particularly in underdeveloped rural areas.

Keywords: Asset Based Community Development; Rural Development

1. Pendahuluan

Pembangunan memegang peranan penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan yang baik akan menghasilkan peningkatan produktivitas dan daya saing dari suatu bangsa. Salah satu kaidah penting dalam pembangunan adalah dilakukan secara multisektoral untuk menjamin keselarasan, keterkaitan, maupun keterhubungan antar sektor pendukung kehidupan di masyarakat. Pembangunan juga perlu direncanakan dengan matang dan terstruktur agar mencapai hasil yang optimal [1].

Di era revolusi industri 4.0, arus globalisasi memberikan pengaruh terhadap aspek pembangunan di Indonesia. Kemajuan teknologi dan informasi dapat membuka ruang akses informasi bagi daerah-daerah yang berada di pelosok dan terpencil serta minim sarana prasarana penunjang pergerakan. Berbagai program terus dilakukan pemerintah untuk mendorong masuknya teknologi informasi ke wilayah pelosok dan terpencil termasuk pengalokasian anggaran untuk percepatan transformasi digital di tahun 2021 sebesar 30,5 triliun rupiah [2].

Kemajuan teknologi dan informasi membawa beberapa dampak termasuk aspek modernitas yang menyertai kegiatan pembangunan. Daerah yang dulunya terbelakang sekarang sudah mulai beranjak menjadi semakin modern. Perlahan pola pikir masyarakat tradisional yang memang teguh prinsip dan budaya hidup bersama semakin pudar dan menuju ke arah individualistis. Peningkatan kesejahteraan dianggap sulit dilakukan di wilayah asal dan jalan pintasnya adalah dengan bermigrasi ke wilayah perkotaan. Kondisi ini membuat jumlah

penduduk ke wilayah perkotaan terus meningkat. Saat ini jumlah penduduk perkotaan secara global sebesar 55% dari total jumlah penduduk dan akan menjadi 68% di tahun 2050 [3].

Fenomena tersebut ditanggapi serius oleh Pemerintah Indonesia. Berbagai arah kebijakan pembangunan yang pro terhadap kawasan pedesaan terus dilakukan meliputi, pembangunan infrastruktur penunjang pedesaan [4], bantuan usaha kecil dan mikro [5], dan bantuan dana desa sebesar 1 milyar per tahun [6]. Program-program ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing kawasan pedesaan di Indonesia.

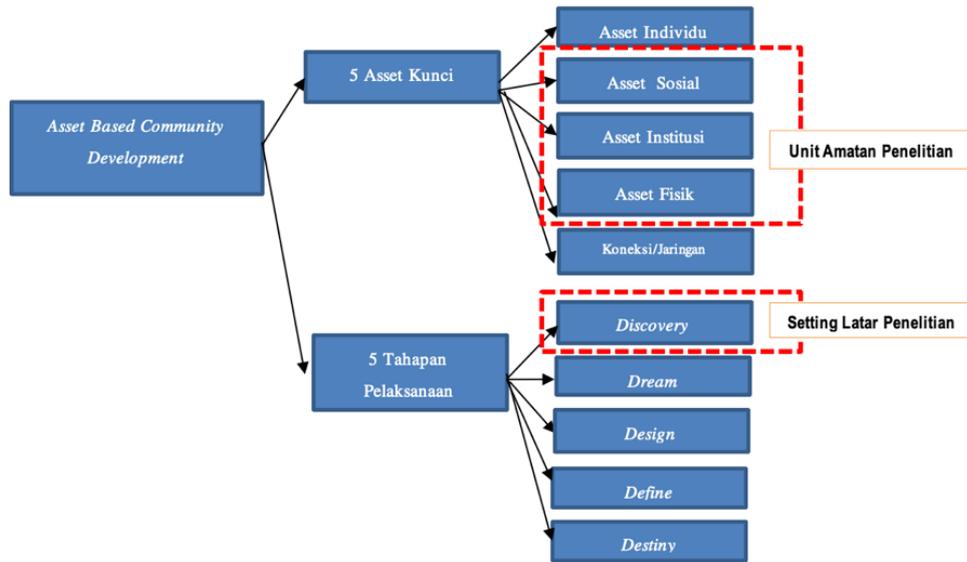
Pembangunan pedesaan selayaknya dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu *top down* dan *bottom up*. Berbagai studi menyebutkan pembangunan secara *top down* terkadang menemui berbagai kendala yang menyebabkan hasil capaian pembangunan tidak optimal. Dalam kasus dana desa, hasil studi menunjukkan pengelolaan dan penggunaan dana desa tidak memberi dampak signifikan bagi pertumbuhan pembangunan daerah [7]. Untuk itu, program pembangunan pedesaan yang sudah digulirkan pemerintah dapat ditunjang melalui mekanisme *bottom up* seperti *asset based community development*.

Asset based community development merupakan strategi pembangunan yang dikembangkan oleh John Mcknight dan Jody Kretzmann. Strategi ini berasumsi bahwa pembangunan dapat dilakukan dengan memanfaatkan aset yang tersedia di wilayah tersebut dan berorientasi pada perbaikan modal sosial pada suatu masyarakat [8]. Berbagai contoh kasus yang sukses dengan menerapkan metode ini di antaranya adalah pemberdayaan masyarakat pedesaan di Desa Cangaan Kabupaten Bojonegoro [9] dan pembangunan ekonomi melalui wisata halal Desa Pujon Kidul di Kabupaten Malang [10].

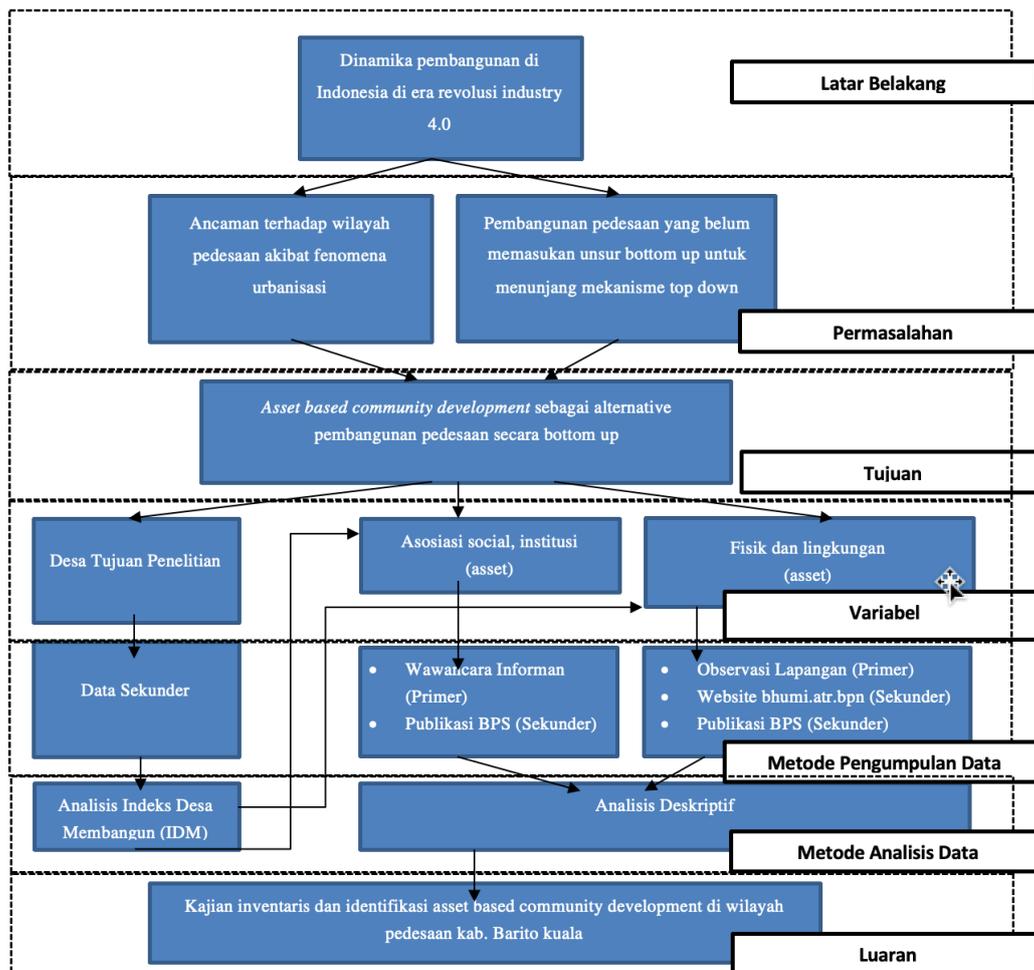
Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Barito Kuala Kalimantan Selatan. Di kabupaten ini terdapat 17 kecamatan dan 194 desa [11]. Berdasarkan berita yang dilansir dari laman kanal Kalimantan, di tahun 2020 masih terdapat 16 desa yang masuk dalam kategori desa tertinggal [12]. Melalui pendekatan *asset based community development* dapat diidentifikasi aset yang dapat mendukung pembangunan di wilayah pedesaan tertinggal tersebut.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif rasionalistik. Pendekatan rasionalistik digunakan berdasarkan pada parameter dan variabel terkait tema penelitian. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menjelaskan tipe data yang ingin dikumpulkan, dianalisis, dan disimpulkan untuk mencapai tujuan penelitian. Lingkup penelitian berupa kawasan pedesaan yang berada wilayah administrasi Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan. Latar penelitian adalah di tahapan *discovery* atau identifikasi aset untuk menunjang kegiatan pengembangan masyarakat yang diinisiasi oleh Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) dan Perguruan Tinggi. Unit amatan penelitian berupa aset sosial, aset institusi, dan aset fisik (lihat Gambar 1).



Gambar 1. Unit amatan penelitian dan setting latar penelitian [13,14].



Gambar 2. Kerangka alir penelitian.

Pada Gambar 2, dijelaskan bahwa pengumpulan data dilakukan secara primer dan sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara dengan kepala desa dan sekretaris desa tujuan penelitian dan observasi lapangan. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui website resmi *bhumi.atr.bpn*, dan publikasi Badan Pusat Statistik. Metode analisis data untuk menentukan lokasi desa tujuan penelitian dengan perhitungan (Indeks Desa Membangun IDM) dan analisis deskriptif untuk menjabarkan aset sosial, aset institusi, dan aset fisik di tiap desa studi.

3. Hasil penelitian dan pembahasan

3.1. Penentuan lokasi penelitian

Metode perhitungan yang digunakan dalam menentukan lokasi penelitian ini, yaitu mengacu pada Standar Operasional Prosedur Pemutakhiran Status Perkembangan Desa Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2021 [15]. Desa tujuan penelitian adalah desa yang memiliki status sebagai desa tertinggal. Hasil perhitungan IDM dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil perhitungan IDM dan klasifikasi status desa.

No	Nama Desa	Nilai IDM	Status Desa
1	Desa Pulau Sewangi	0,5989	Desa Tertinggal
2	Desa Pulau Alalak	0,5975	Desa Tertinggal

Berdasarkan hasil perhitungan IDM, Desa Pulau Sewangi memiliki nilai 0,5989 dan Desa Pulau Alalak memiliki nilai 0,5975. Kedua desa tersebut masuk dalam ambang batas klasifikasi desa tertinggal, yakni $0,4907 < \text{IDM} \leq 0,5989$ dan layak dijadikan sebagai desa tujuan penelitian.

3.2. Aset sosial

Data jumlah penduduk Desa Pulau Sewangi dan Desa Pulau Alalak pada tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Data jumlah penduduk di Desa Pulau Sewangi dan Desa Pulau Alalak tahun 2021.

No.	Desa	Jumlah Penduduk (Jiwa)		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Pulau Sewangi	1.225	1.272	2.497
2	Pulau Alalak	3352	3410	3466

Berdasarkan Tabel 2, diketahui bahwa jumlah penduduk di Desa Pulau Alalak, yaitu sebanyak 2.497 jiwa dan Desa Pulau Alalak sebanyak 3.466 jiwa penduduk. Dari segi jumlah penduduk, Desa Pulau Alalak memiliki jumlah penduduk lebih banyak dibandingkan dengan Desa Pulau Sewangi.

Kegiatan sosial keagamaan dan kesenian yang sampai saat ini masih dilakukan di Desa Pulau Sewangi, yaitu pengajian yasinan yang terdiri dari lima kelompok dan maulid habsyi yang terdiri dari 15 grup. Sementara itu, di Desa Pulau Alalak, yaitu pengajian yasinan yang terdiri

dari empat kelompok, maulid habsyi yang terdiri dari 6 kelompok, bulutangkis 1 kelompok, futsal 1 kelompok, dan dayung 2 kelompok.

Mata pencaharian penduduk di Desa Pulau Sewangi adalah tukang atau kuli bangunan, pekerja buruh, pedagang, petani, PNS. Sementara itu, mata pencaharian penduduk di Desa Pulau Alalak adalah pekerja buruh, pekerja swasta, wiraswasta, pedagang, dan petani.

Desa Pulau Sewangi memiliki beberapa kelompok masyarakat, yaitu Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani), Komunitas Pembuat Jukung dan Klotok, Kelompok Pengajian Yasinan, dan Kelompok Maulid Habsyi.

Desa Pulau Sewangi juga memiliki industri pembuatan jukung dan klotok yang merupakan produk unggulan desa serta pembuatan peti buah yang di produksi di desa tersebut, kemudian dijual ke luar daerah. Sementara itu, di Desa Pulau Alalak terdapat usaha kayu *moulding* sebanyak tiga buah dan pengolahan kayu atau silkar 17 buah yang di produksi di desa tersebut dan kemudian dijual ke luar daerah.

3.3. Aset institusi

Aset institusi di daerah penelitian meliputi kelembagaan formal seperti dalam Tabel 3.

Tabel 3. Kelembagaan formal di Desa Pulau Sewangi dan Desa Pulau Alalak tahun 2021.

No.	Desa Pulau Sewangi	Desa Pulau Alalak
1	Pemerintah Desa Pulau Sewangi	Pemerintah Desa Pulau Alalak
2	BPD (Badan Permusyawaratan Desa)	BPD (Badan Permusyawaratan Desa)
3	PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga)	LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat)
4	SDN (Sekolah Dasar Negeri) Pulau Sewangi 1	PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga)
5	SDN (Sekolah Dasar Negeri) Pulau Sewangi 2	MI (Madrasah Ibtidaiyah) Nurul Hidayah
6	TK (Taman Kanak-Kanak) Harapan Ibu	Puskesmas Pembantu
7	SPS (Satuan PAUD Sejenis) Harapan Ibu	SDN (Sekolah Dasar Negeri) Pulau Alalak
8	Pondok Bersalin Desa Pulau Sewangi	SMPN 6 (Sekolah Menengah Pertama Negeri) Alalak
9	-	Pondok Pesantren Salafiyah
10	-	TPA (Taman Pendidikan Al-Quran) Nurul Absyar
11	-	MI (Madrasah Ibtidaiyah) Nahdlatul Ulama 1 Marabahan

Berdasarkan Tabel 3, dapat disimpulkan bahwa jenis kelembagaan formal di Desa Pulau Sewangi dan Desa Pulau Alalak, meliputi Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), lembaga pendidikan (PAUD, TK, TPA, SD, MI, Pesantren dan SMP), dan lembaga kesehatan (Pondok Bersalin dan Puskesmas Pembantu).

3.4. Aset fisik

3.4.1. Letak geografis dan batas desa. Desa Pulau Sewangi dan Desa Pulau Alalak merupakan desa yang ada di Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan. Desa Pulau Sewangi memiliki luas sebesar 0,55 km² atau 55 Ha yang terdiri dari 12 Rukun Tetangga (RT). Batas desa di sebelah utara berbatasan dengan Desa Pulau Sugara, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pulau Alalak, sebelah timur berbatasan dengan Sungai Alalak, dan sebelah barat berbatasan dengan Sungai Barito. Desa Pulau Alalak memiliki luas sebesar 1,21 km² atau 121 Ha yang terdiri dari 10 Rukun Tetangga (RT). Batas desa di sebelah utara berbatasan dengan Desa Pulau Sewangi, sebelah selatan berbatasan dengan Sungai Barito, sebelah timur berbatasan dengan Sungai Alalak, dan sebelah barat berbatasan dengan Sungai Barito.

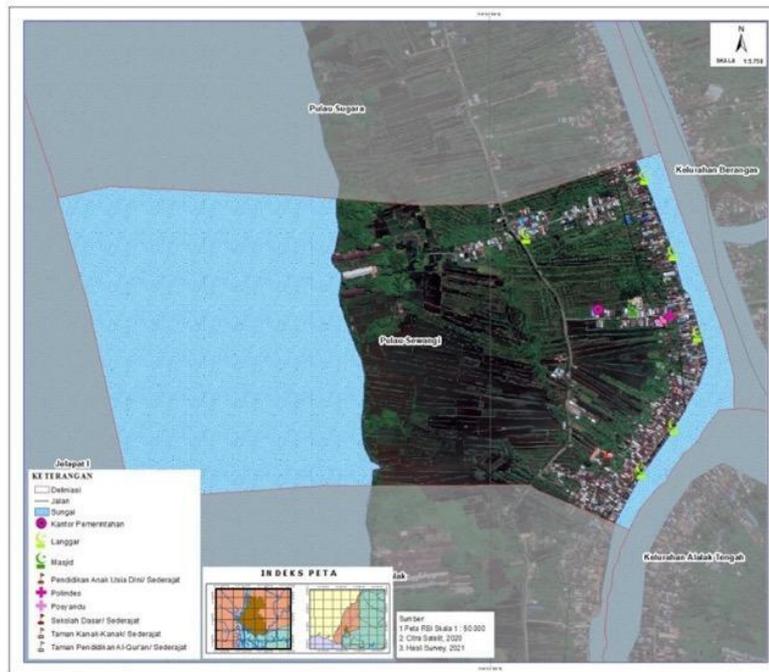
3.4.2. Lahan pertanian. Berdasarkan hasil observasi lapangan, diperoleh data jumlah sarana pendidikan yang terdapat di Desa Pulau Sewangi dan Pulau Alalak pada tahun 2021 yang dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Data jumlah sarana di Desa Pulau Sewangi dan Desa Pulau Alalak tahun 2021.

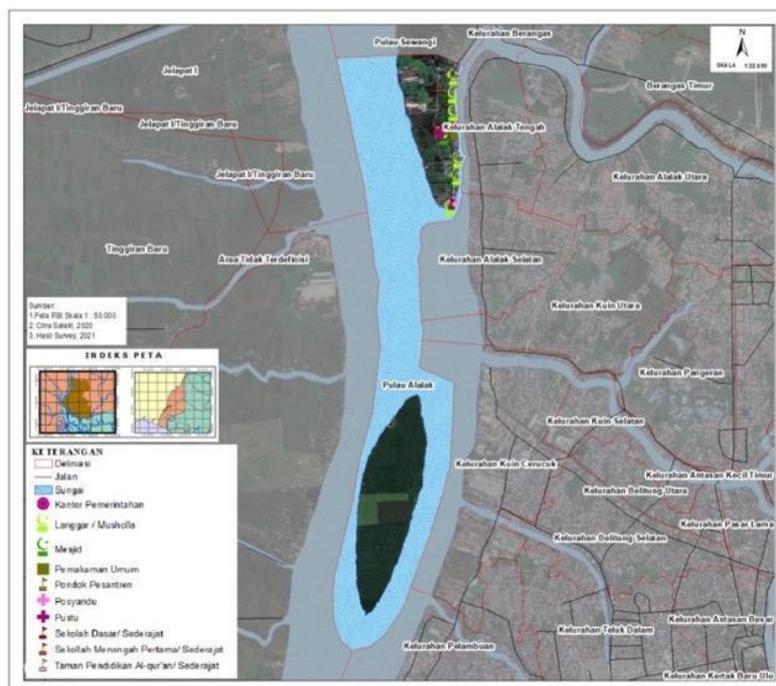
Jenis Sarana	Keterangan	Jumlah
Desa Pulau Sewangi:		
Pendidikan	TK Al-Quran/TPA	1
	PAUD/SPS	1
	Taman Kanak-Kanak dan Kelompok Bermain	1
	SD/ sederajat	2
Peribadatan	Masjid	1
	Musholla/langgar	6
Kesehatan	Polindes	1
	Posyandu	3
Perkantoran	Kantor Desa	1
Total		17
Desa Pulau Alalak:		
Pendidikan	TK Al-Quran/TPA	2
	SD/ sederajat	3
	SLTP	1
	Pondok Pesantren	1
Peribadatan	Masjid	1
	Musholla/langgar	6
Kesehatan	PUSTU	1
	Posyandu	3
Perkantoran	Kantor Desa	1
Total		19

Berdasarkan Tabel 4 dapat disimpulkan Desa Pulau Alalak memiliki lebih banyak jumlah sarana, yakni sebanyak 19 buah dibandingkan dengan Desa Pulau Sewangi yang memiliki sarana sebanyak 17 buah. Sarana tersebut terdiri atas sarana pendidikan, sarana peribadatan,

sarana kesehatan, dan sarana perkantoran. Sebaran titik sarana di Desa Pulau Alalak dan Desa Pulau Sewangi secara spasial dapat diamati pada Gambar 3 dan Gambar 4.



Gambar 3. Peta titik sarana di Desa Pulau Sewangi.



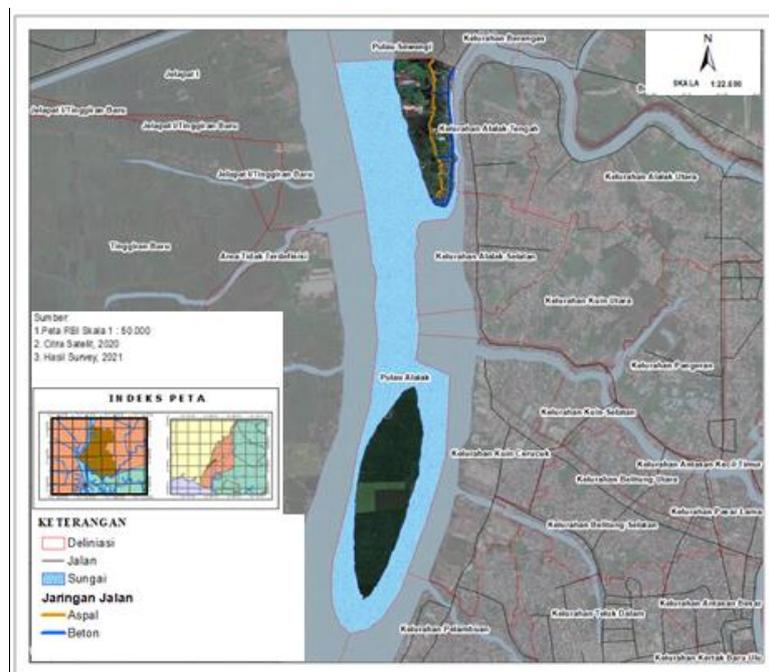
Gambar 4. Peta titik sarana di Desa Pulau Alalak.

3.4.3. Prasarana.

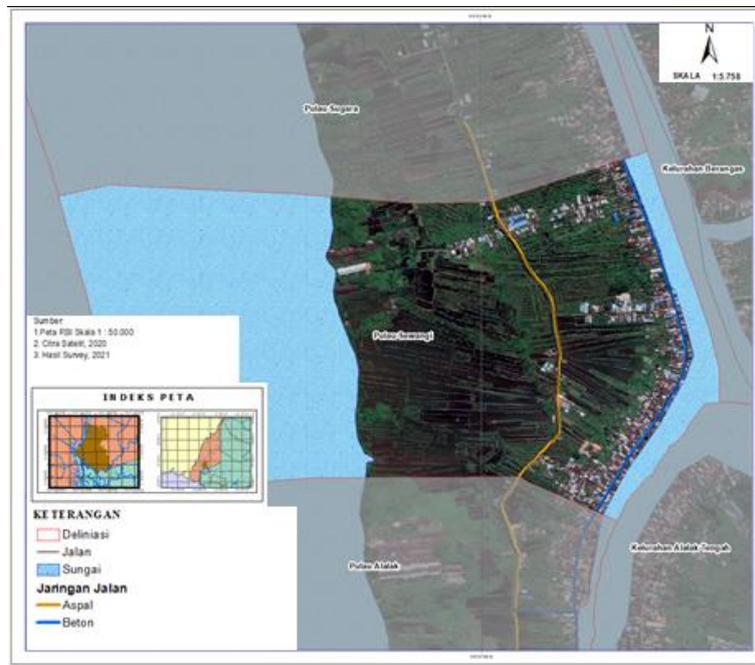
a. *Jaringan jalan.* Untuk jaringan jalan di Desa Pulau Sewangi dan Desa Pulau Alalak jenis perkerasannya, yaitu aspal dan cor atau beton dengan kondisi baik sampai rusak, terutama pada Jalan Pulau Sewangi perkerasannya aspal, tetapi kondisinya sudah mulai rusak (lihat Gambar 5). Sementara itu, Jalan Pembelah Pulau dengan lebar jalan kurang lebih tiga meter, perkerasannya aspal dengan kondisi baik sampai sedang. Sementara itu, jalan dengan perkerasan cor atau beton kondisinya sudah mulai rusak. Sebaran jaringan jalan di Desa Pulau Alalak dan Desa Pulau Sewangi dapat dilihat pada Gambar 6 dan Gambar 7.



Gambar 5. Kondisi eksisting jaringan jalan di Desa Pulau Sewangi dan Desa Pulau Alalak.



Gambar 6. Peta jaringan jalan di Pulau Alalak.



Gambar 7. Peta jaringan jalan di Pulau Sewangi.

b. Jaringan listrik. Desa Pulau Sewangi dan Desa Pulau Alalak sudah sepenuhnya teraliri oleh jaringan listrik dari PLN ke rumah-rumah masyarakat. Adapun jaringan listrik tersebut berupa jaringan SUTM dan SUTR (lihat Gambar 8). Untuk sebaran jaringan listrik di Desa Pulau Alalak dan Desa Pulau Sewangi dapat dilihat pada Gambar 9 dan Gambar 10.

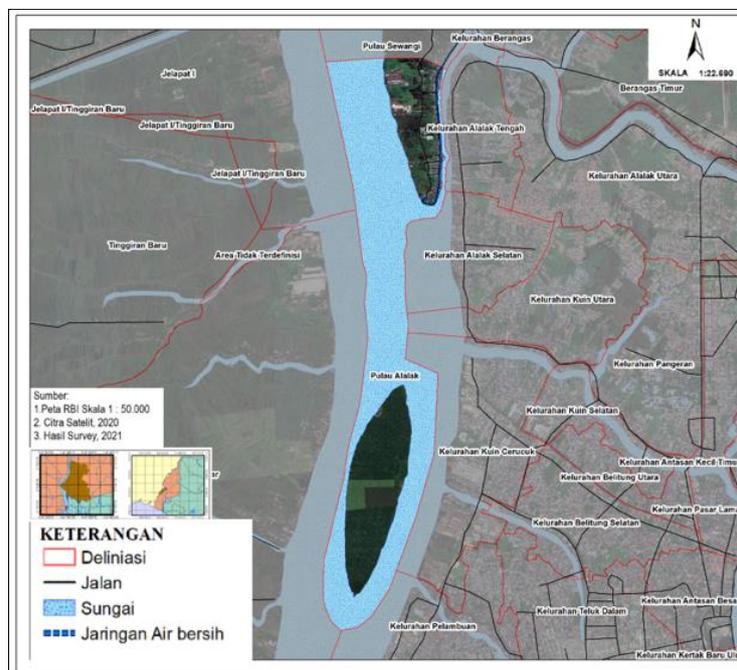


Gambar 8. Kondisi eksisting jaringan listrik di Desa Pulau Sewangi.

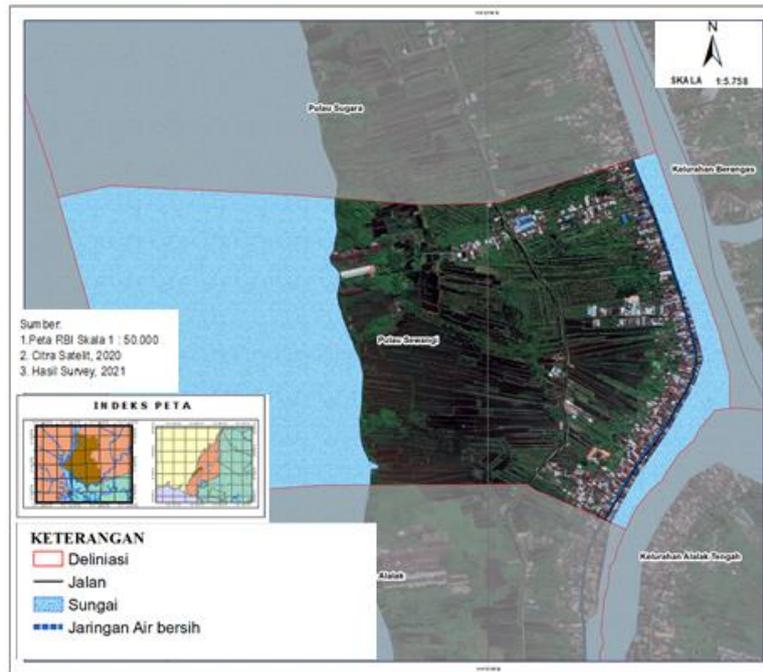
jeriken untuk membeli langsung ke tempat penjual ataupun seharga Rp 1000 per jeriken yang akan diantar ke rumah pelanggan air keliling (lihat Gambar 11). Letak desa yang berada di pinggiran Sungai Alalak (anak Sungai Barito) menyebabkan sebagian besar masyarakatnya menggunakan air sungai untuk keperluan MCK ataupun konsumsi. Hanya beberapa masyarakat yang menggunakan air PDAM dikarenakan airnya sedikit dan pipa untuk mengalirkan ke rumah rumah volumenya kecil. Jadi banyak masyarakat yang langsung mengambil air sungai menggunakan mesin air. Sebaran jaringan air bersih di Desa Pulau Alalak dan Desa Pulau Sewangi dapat dilihat pada Gambar 12 dan Gambar 13.



Gambar 11. Air isi ulang di Desa Pulau Alalak.



Gambar 12. Peta jaringan air bersih di Pulau Alalak.

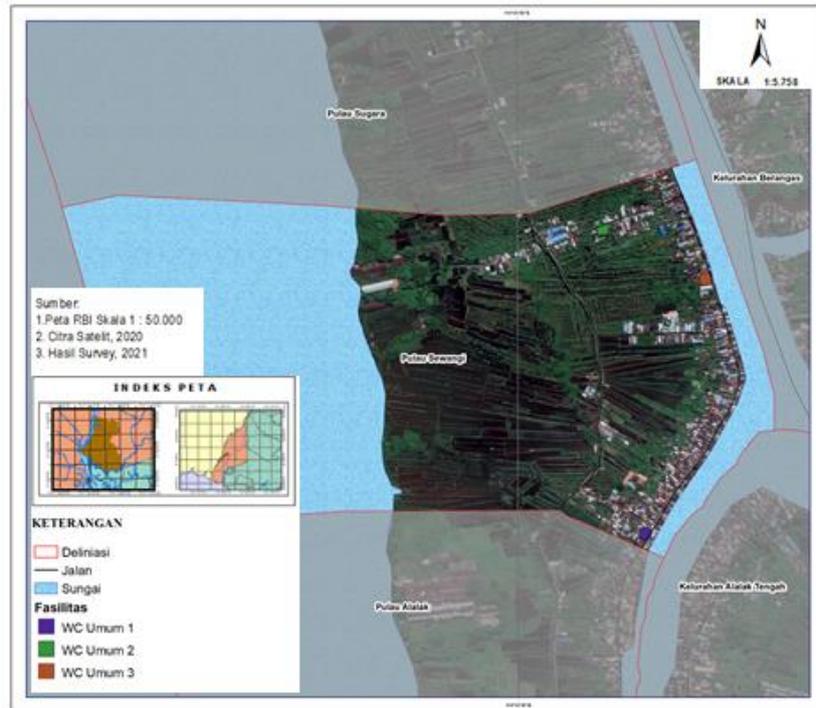


Gambar 13. Peta jaringan air bersih di Pulau Sewangi.

d. Jaringan sanitasi. Untuk sanitasi di Desa Pulau Sewangi dan Desa Pulau Alalak tidak jauh berbeda, sekarang masyarakatnya sudah menggunakan *septictank*. Oleh karena itu, untuk penggunaan jamban sudah mulai berkurang. Selain itu, di Desa Pulau Sewangi terdapat WC umum yang biasa digunakan masyarakat untuk MCK (lihat Gambar 14), tetapi WC umum tersebut tidak semuanya berfungsi dengan baik karena ada kerusakan dan tidak ada pengelolanya sehingga banyak masyarakat tidak menggunakan WC umum dan lebih memilih menggunakan WC pribadi. Bagi warga yang memiliki rumah di pinggir sungai, beberapa rumah masih menggunakan jamban dan ada pula yang menggunakan WC pribadi di rumah, tetapi limbah buangnya langsung dibuang di sungai tanpa diolah terlebih dahulu. Sebaran WC umum di Desa Pulau Sewangi terlihat pada Gambar 15.



Gambar 14. WC umum di Desa Pulau Sewangi.

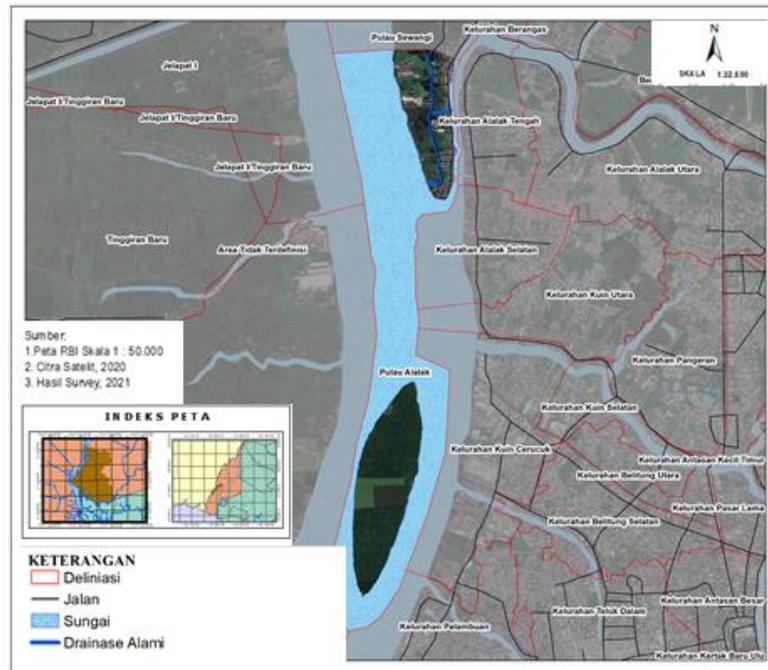


Gambar 15. Peta sebaran WC umum di Desa Pulau Sewangi.

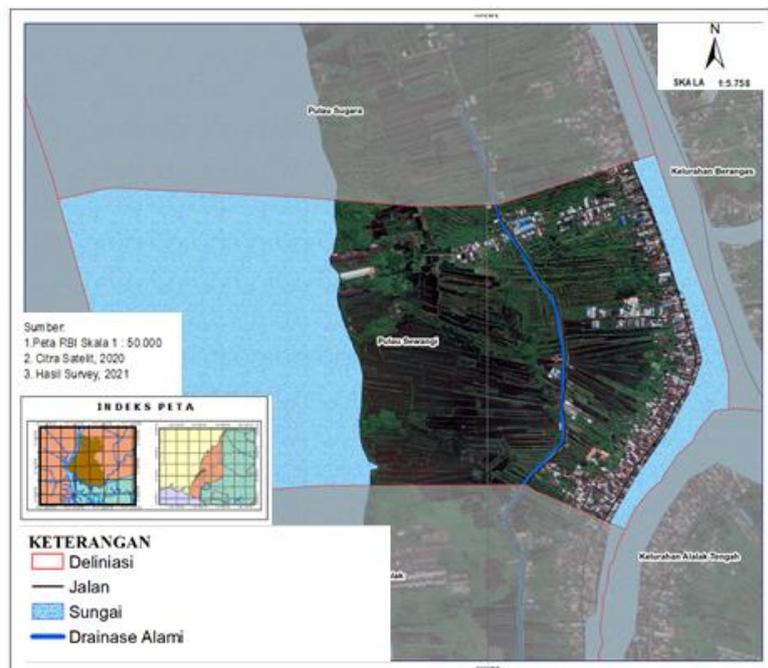
e. Jaringan drainase. Drainase yang terdapat di Desa Pulau Sewangi dan Desa Pulau Alalak, yaitu drainase alami yang terbentuk dari gerusan air berupa sungai. Aliran irigasi langsung menuju ke sungai, yaitu Sungai Barito dan Sungai Alalak. Drainase jenis ini dikenal sebagai *natural drainage*, yaitu drainase yang dibentuk secara alami dengan tidak adanya bangunan-bangunan pendukung, seperti gorong-gorong, batu atau beton, dan lainnya. Pada kondisi aliran air, beberapa ada yang tersumbat oleh sampah sehingga hal ini dapat mengakibatkan air sungai meluap karena tidak dapat mengalir dengan baik (lihat Gambar 16). Sebaran jaringan drainase di Desa Pulau Sewangi dan Desa Pulau Alalak dapat dilihat pada Gambar 17 dan Gambar 18 berikut ini.



Gambar 16. Kondisi eksisting jaringan drainase di Desa Pulau Alalak.



Gambar 17. Peta jaringan drainase di Desa Pulau Alalak.



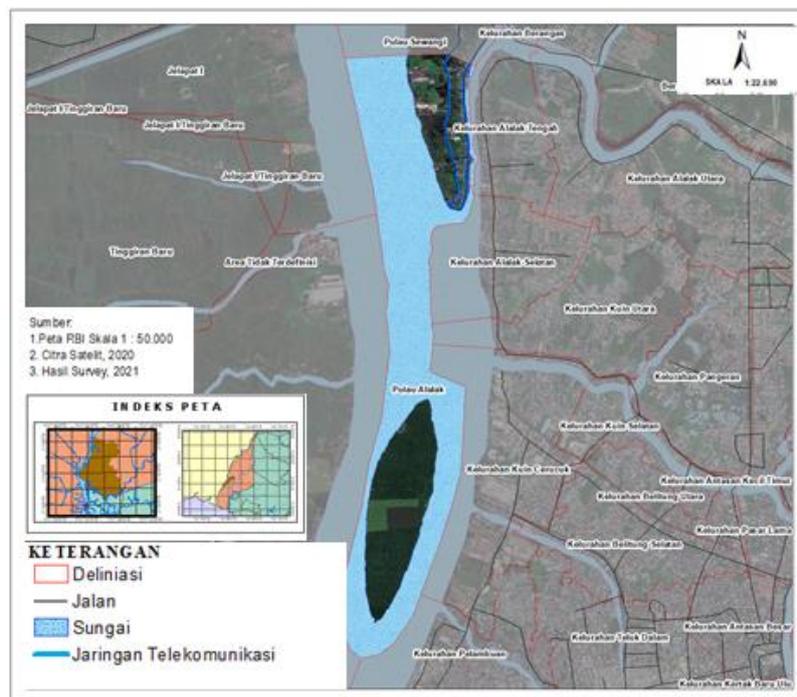
Gambar 18. Peta jaringan drainase di Desa Pulau Sewangi.

f. Jaringan telekomunikasi. Kondisi jaringan telekomunikasi di Desa Pulau Sewangi dan Desa Pulau Alalak sudah terlayani oleh jaringan dari Telkom dan jaringannya berada di samping Jalan Pembelah Pulau dan Jalan Pulau Sewangi (lihat Gambar 19). Sebaran jaringan

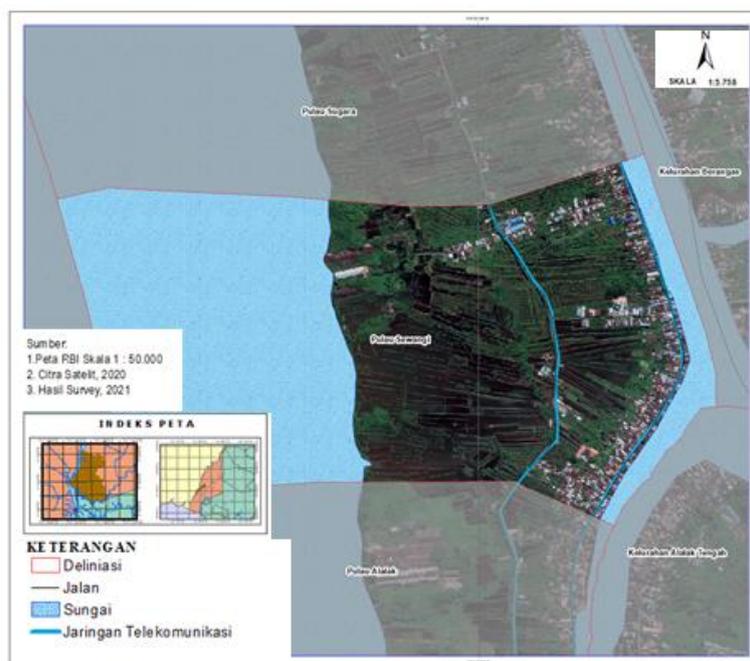
telekomunikasi di Desa Pulau Alalak dan Desa Pulau Sewangi dapat dilihat pada Gambar 20 dan Gambar 21.



Gambar 19. Kondisi eksisting jaringan telekomunikasi di Jalan Pembelah Pulau.



Gambar 20. Peta jaringan telekomunikasi di Desa Pulau Alalak.



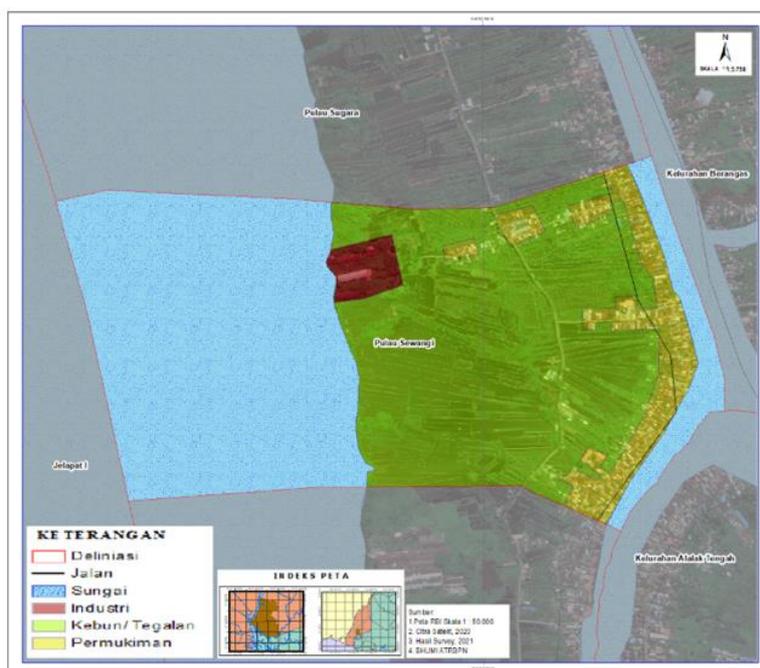
Gambar 21. Peta jaringan telekomunikasi di Desa Pulau Sewangi.

g. Jaringan persampahan. Kondisi persampahan di Desa Pulau Sewangi dan Desa Pulau Alalak saat ini, masih dilakukan secara individu oleh masyarakat dengan cara membuang ke sungai, membakar, dan ada juga yang membawa sampah ke pasar untuk di buang di TPS sekitar. Hal ini disebabkan belum tersedianya TPS di desa tersebut dan belum ada pengelolaan sampah secara komunal di desa tersebut.

3.4.4. Penggunaan lahan. Penggunaan lahan di Desa Pulau Sewangi Kecamatan Alalak didominasi oleh perkebunan sebesar 42,22% dan permukiman sebesar 8,76% dengan total luas kawasan sebesar 105,44 Ha. Salah satu perkebunan yang ada di Desa Pulau Sewangi adalah kebun perkebunan masyarakat sekitar. Selain itu, penggunaan lahan yang terdapat di desa tersebut, yaitu lahan persawahan, industri, dan fasilitas umum lainnya (lihat Gambar 22). Presentase dan luasan penggunaan lahan Desa Pulau Sewangi dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Luasan penggunaan lahan di Desa Pulau Sewangi.

No.	Jenis	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Sungai	49,56	47,00
2	Kebun/Tegalan	44,51	42,22
3	Permukiman	9,24	8,76
4	Jasa/Industri	2,13	2,02
5	Sungai	49,56	47,00
Total		105,44	100

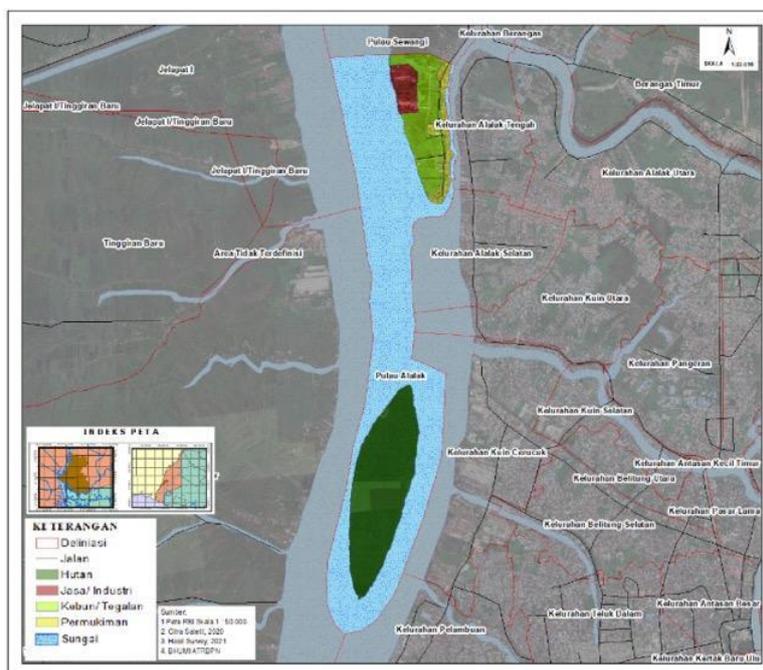


Gambar 22. Peta penggunaan lahan Desa Pulau Sewangi.

Penggunaan lahan di Desa Pulau Alalak Kecamatan Alalak didominasi oleh hutan sebesar 20,18%, perkebunan sebesar 8,91%, dan permukiman sebesar 2,84% dengan total luas kawasan sebesar 396,20 Ha². Salah satu perkebunan yang ada di Desa Pulau Alalak adalah kebun karet (lihat Gambar 23). Selain itu, penggunaan lahan yang terdapat di desa tersebut adalah persawahan dan fasilitas umum lainnya. Presentase dan luasan penggunaan lahan Desa Pulau Alalak dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Luasan penggunaan lahan di Desa Pulau Alalak.

No	Jenis	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Sungai	259,52	65,50
2	Kebun/Tegalan	35,31	8,91
3	Permukiman	11,27	2,84
4	Jasa/Industri	10,16	2,56
8	Hutan	79,95	20,18
Total		396,20	100



Gambar 23. Peta penggunaan lahan Desa Pulau Alalak.

4. Kesimpulan

Pelaksanaan inventarisasi aset berdasarkan konsep *asset based community development* dilakukan di dua desa yang berstatus sebagai desa tertinggal, yaitu Desa Pulau Sewangi dan Desa Pulau Alalak. Aset yang diinventarisasi, meliputi aset sosial, aset institusi, dan aset fisik. Inventarisasi aset sosial, meliputi jumlah penduduk, kegiatan sosial, dan mata pencaharian masyarakat. Inventarisasi aset institusi berupa jumlah dan jenis-jenis kelembagaan formal. Inventarisasi aset fisik, meliputi sarana pelayanan umum, jaringan jalan, jaringan listrik, jaringan air bersih, jaringan sanitasi, jaringan drainase, jaringan telekomunikasi, jaringan persampahan, dan penggunaan lahan eksisting di Desa Pulau Sewangi dan Desa Pulau Alalak. Hasil inventarisasi aset sosial, aset institusi, dan aset fisik menunjukkan terdapat perbedaan dari segi ketersediaan dan kuantitas masing-masing aset di Desa Pulau Sewangi dan Desa Pulau Alalak. Hasil inventarisasi diharapkan dapat menjadi masukan dalam perumusan program, kebijakan, dan kegiatan yang diinisiasi oleh pemerintah, swasta, dan perguruan tinggi terutama yang sejalan dengan prinsip *asset based community development* untuk menunjang pembangunan pedesaan, khususnya bagi desa dengan kategori tertinggal.

Referensi

- [1] Indonesia PR. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pemerintah Republik Indones 2004.
- [2] Sugianto D. Jokowi Mau Bikin Akses Internet untuk 4000 Desa Tahun 2021. Detik Inet 2020. <https://inet.detik.com/law-and-policy/d-5133267/jokowi-mau-bikin-akses-internet-untuk-4000-desa-tahun-2021>.
- [3] Zhou Y, Varquez ACG, Kanda M. High-Resolution Global Urban Growth Projection Based on Multiple Applications of the SLEUTH Urban Growth Model. *Sci Data* 2019;6:1–10.

- <https://doi.org/10.1038/s41597-019-0048-z>.
- [4] Pembangunan Infrastruktur Guna Menuju Desa Maju dan Mandiri (Internet) Indonesia: Desa Dungmiri. *DungmiriNgawikabId* 2021. <https://dungmiri.ngawikab.id/2021/05/pembangunan-infrastruktur-guna-menuju-desa-maju-dan-mandiri/>.
- [5] Bangkitkan UMKM Desa di Indonesia, DIGIDES Beri Bantuan Usaha Melalui Lomba UMKM Digital Desa 2021. *Digitaldesald* 2021. <https://digitaldesa.id/artikel/bangkitkan-umkm-desa-di-indonesia-digides-beri-bantuan-usaha-melalui-lomba-umkm-digital-desa-2021>.
- [6] Santia T. Program Satu Desa Satu Miliar Efektif Tingkatkan Kesejahteraan di Daerah? *Liputan 6* 2020. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4289505/program-satu-desa-satu-miliar-efektif-tingkatkan-kesejahteraan-di-daerah>.
- [7] Jamaluddin Y, Sumaryana A, Rusli B, Buchari RA. Analisis Dampak Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa terhadap Pembangunan Daerah. *JPPUMA J Ilmu Pemerintah Dan Sos Polit Univ Medan Area* 2018;6:14–24. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v6i1.1520>.
- [8] Mallapiang F, Kurniati Y, Syahrir S, Lagu AMH, Sadarang RAI. Pengelolaan Sampah dengan pendekatan Asset-Based Community Development (ABCD) di Wilayah Pesisir Bulukumba Sulawesi Selatan. *Riau J Empower* 2020;3:79–86. <https://doi.org/10.31258/raje.3.2.79-86>.
- [9] Fithriyana E. Pengolahan Produk Berbahan Dasar Buah Pepaya Sebagai Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pedesaan. *Al-Umron J Pengabdian Kpd Masy* 2020;1:1–9. <https://doi.org/10.36840/alumron.v1i2.301>.
- [10] Taqwiem A, Zakaria AR. Wisata Halal untuk Mencapai Pembangunan Ekonomi Masyarakat Desa dan Tujuan Maqashid Syariah (Studi Kasus pada Desa Wisata Pujon Malang Jawa Timur). *El-Aswaq* 2020;1:1–7.
- [11] Desa & Kelurahan Kabupaten Barito Kuala. *BaritokualakabGold* 2021. <https://baritokualakab.go.id/nama-desa-kelurahan/>.
- [12] Arfiandy D. Tersisa 16 Desa Berstatus Tertinggal di Batola. *KanalkalimantanCom* 2020. <https://www.kanalkalimantan.com/tersisa-16-desa-berstatus-tertinggal-di-batola/>.
- [13] Hanachor ME, Wordu EN. Developing a Model for Promoting Asset Based Community Development (ABCD) in Nigeria. *Int J Res -GRANTHAALAYAH* 2021;9:522–8. <https://doi.org/10.29121/granthaalayah.v9.i4.2021.3881>.
- [14] Tamam AB, Fahimah S. Pengembangan Agrowisata Berbasis Komunitas Melalui Program Edukasi Wisata dan Entrepreneurship Menuju Kemandirian Ekonomi Masyarakat. *Engagem J Pengabdian Kpd Masy* 2020;4:100–15. <https://doi.org/10.29062/engagement.v4i1.139>.
- [15] Standar Operasional Prosedur Pemutakhiran Status Perkembangan Desa Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2021. *IdmKemendesaGold* 2021. <https://idm.kemendesa.go.id/view/detil/3/publikasi>.